



ANALISIS PENGELUARAN PEMERINTAH, TENAGA KERJA DAN KEBIJAKAN RENSTRA TERHADAP PDRB SEKTOR PERTANIAN

Yana Puspita Kristiana✉

Bank Central Asia, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima September 2015
Disetujui Oktober 2015
Dipublikasikan
November 2015

Keywords:

*PDRB agricultural sector,
governments expenditure,
workers in agricultural sector
and strategic plan of
Directorate General of
Infrastructure and Facilities
Agriculture*

Abstrak

Penurunan dan lambatnya pertumbuhan sektor pertanian terjadi setiap tahunnya di Provinsi Jawa Tengah, padahal Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan sektor pertanian diantaranya pengeluaran pemerintah sektor pertanian yang setiap tahunnya mengalami kenaikan, jumlah tenaga kerja sektor pertanian setiap tahun mengalami penurunan dan kebijakan Kementerian Pertanian melalui RENSTRA DIRJEN Prasarana dan Sarana Pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa faktor diatas terhadap PDRB sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah. Hasil analisa data menunjukkan variabel pengeluaran pemerintah, tenaga kerja sektor pertanian dan kebijakan RENSTRA DIRJEN Prasarana dan Sarana Pertanian berpengaruh terhadap PDRB sektor pertanian. Sedangkan secara simultan, semua variabel independen berpengaruh terhadap PDRB sektor pertanian. Koefisien determinasi R^2 sebesar 99% menunjukkan variabel independen yang diteliti mampu menjelaskan pengaruhnya sebesar 99% terhadap variabel dependen, sedangkan sisanya sebesar 1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

Abstract

The declining and slow – moving of growth in agricultural sector happens every year in Central Java Province, where as this Province has become one of the national food resources. There are several factors which cause the slack of the growth in agricultural sector, namely government expenditure which raises each year, the decreasing of workers and agricultural ministry's policy through the strategic plan of Directorate General of Infrastructure and facilities agriculture. This research aims to find out the influence of those aforementioned factors toward PDRB in agricultural sector in Central Java Province. The result of the data analysis shows that variable of governments expenditure, workers in agricultural sector and strategic plan of Directorate General of Infrastructure and facilities agriculture do influence the growth in agricultural sector. Simultaneously all the independent variables show significant influence towards the growth in agricultural sector. Determinant Koefisien (R^2) shows that the examined independent variables are able to explain its influence by 99% towards the dependent variable, whereas the rest 1 % is explained by other variable which is not involved in this research..

PENDAHULUAN

Pertumbuhan sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan dan perlambatan. Hal ini dikarenakan di Provinsi Jawa Tengah telah terjadi tranfosrmasi ekonomi, dari sektor primer menuju sektor sekunder. Perubahan struktur atau transformasi ekonomi tradisional menjadi modern secara umum dapat dilihat sebagai suatu perubahan yang berkaitan dengan perkembangan di berbagai sektor ekonomi dan kontribusi sektor – sektor tersebut terhadap PDRB suatu wilayah (Hasani, 2010 : 5). PDRB sektor pertanian dari tahun 2008 – 2013 mengalami peningkatan dalam jumlah nilai terhadap PDRB, namun nilai kontribusinya selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun dibandingkan dengan sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang selalu meningkat kontribusinya.

Perubahan struktur ekonomi yang terjadi menarik untuk dikaji mengingat Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Menurut Permendagri No. 13 tahun 2006, sektor pertanian menjadi urusan pilihan bersama 7 sektor lainnya, urusan pilhan meliputi urusan pemerintah secara nyata berpotensi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, keunikan dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan.

Padahal produksi tanaman yang berkelanjutan diperlukan untuk menjamin keamanan pangan global dan keamanan lingkungan (Bajwa, 2014). Jika suatu negara menghendaki pembangunan yang lancar dan berkesinambungan, maka negara itu harus memulainya dari daerah pedesaan pada umumnya, dan sektor pertanian pada khususnya (Todaro, 2006 : 503). Pertanian yang lebih dinamis untuk mengembangkannya akan memerlukan kerangka kerja kelembagaan yang jelas, dan tidak hanya fokus sempit pada petani kecil (Collier & Dercon, 2014). Namun teknik pertanian tidak harus diterapkan secara universal, praktisi pembangunan harus terlibat dalam pembelajaran dua arah dengan masyarakat setempat untuk mendapatkan keuntungan dari pengetahuan lokal (Halbrendt et al., 2014). Sehingga untuk mendukung peran sektor pertanian di daerah, pemerintah pusat mengalokasikan sejumlah

anggaran ke daerah yang bersumber dari APBN, dan selanjutnya dialokasikan oleh pemerintah daerah ke kabupaten / kota dalam bentuk APBD. Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) dalam Sukirno (2004 : 423) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional.

Alokasi anggaran di sektor pertanian ini masih relatif kecil, sehingga program – program pemerintah yang terkait sektor pertanian relatif terbatas. Keterbatasan anggaran pembangunan sektor pertanian di daerah, disebabkan oleh prioritas alokasi anggaran dalam APBD yang kurang berpihak pada sektor pertanian. Anggaran yang dialokasikan untuk sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya anggaran pembangunan daerah, yaitu dari Rp. 630.325 milyar pada tahun 2008 menjadi Rp. 864.182 milyar pada tahun 2013.

Peningkatan pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian merupakan hal yang sangat penting, sebab sektor pertanian dapat menyerap sebagian besar angkatan kerja perdesaan di negara – negara sedang berkembang termasuk Indonesia khususnya Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan pembangunan sektor pertanian sangat penting untuk memberantas kemiskinan, karena realita menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin tinggal di daerah perdesaan dan mempunyai mata pencaharian di sektor pertanian (Todaro dan Smith, 2003 : 505).

Pada tahun 2011 sampai tahun 2013 sektor pertanian mempunyai kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah, tahun 2011 sektor pertanian dapat menyerap tenaga kerja sebesar 33,78 %, dan ditahun – tahun selanjutnya mengalami penurunan sampai pada tahun 2013 sektor pertanian dapat menyerap tenaga kerja sebesar 30,86%. Meskipun jumlah tenaga kerja sektor pertanian mengalami penurunan namun jumlah penyerapan terhadap tenaga kerja masih menjadi yang terbesar dari sektor – sektor lainnya . Dari tahun 2011 sampai

2013 sektor pertanian dapat menyerap tenaga kerja dengan rata – rata sebesar 32,01%,

Pada RPJMN tahap ke-2 (2010-2014), pembangunan pertanian tetap memegang peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis pertanian tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui pembentukan kapital, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bio-energi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, dan sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan (Renstra Kementerian Pertanian 2010-2014).

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pertanian, tenaga kerja sektor pertanian dan Kebijakan Renstra Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian terhadap PDRB sektor pertanian.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Berdasarkan sumber pengambilannya jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sedangkan menurut waktu pengumpulannya, jenis data dalam penelitian ini adalah data panel (*time series* dan *cross section*) kurun waktu 2008 sampai 2013.

Populasi dan sampel yang diteliti dalam penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah , tenaga kerja sektor pertanian dan PDRB sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 – 2013. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dan situs resmi Direktorat jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia.

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan analisis statistik. Analisis statistik meliputi regresi data panel (uji Chow dan uji Hausman), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedasitas, uji autokorelasi), uji hipotesis (uji F dan uji t), koefisien determinasi.

Metode analisis Data

$$\ln PDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln EXPD_{it} + \beta_2 \ln TK_{it} + \beta_3 DV_{it} + \mu_{it}$$

Dimana :

$\ln PDRB$: Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian

$\ln EXPD$: Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian

$\ln TK$: Tenaga Kerja Sektor Pertanian

DV : Variabel Dummy

β_0 : Intersep

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi

μ_{it} : Komponen *error* di waktu t untuk unit *cross section* i

i : 1,2,3,...,35

t : 2008 – 2013

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Model yang digunakan untuk melihat pengaruh EXPD, TK dan DV terhadap PDRB sektor pertanian adalah sebagai berikut :

Untuk pemilihan model regresi data panel (*Common Effect Model* atau *Fixxed Effect Model*) yang sesuai pendugaan digunakan uji Chow. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Uji Pengaruh	Nilai Statistik	d.f.	Probabilitas
Uji F	36,445988	34,172	0,0000
Uji t	441,981836	34	0,0000

Taraf signifikansi : $\alpha = 5\%$

Sumber : data diolah (*views 8*), 2015

Nilai signifikansi dilihat dari nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak maka dapat disimpulkan model data panel yang digunakan untuk menghasilkan estimasi paling baik dalam mengestimasi pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pertanian, tenaga kerja sektor pertanian dan Kebijakan Renstra

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terhadap PDRB sektor pertanian kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah 2008 – 2013 adalah model *fixed effect*. Selanjutnya akan dilakukan pengujian untuk memilih model terbaik diantara *fixed effect* dan *random effect* menggunakan uji *Hausman*.

Tabel 2. Uji Hausman

Nilai statistik	t	d.f.	Probabilitas
65,042267		3	0,0000

Tingkat signifikansi : $\alpha = 5\%$
 Sumber : data diolah (eviews 8), 2015

Nilai signifikansi dilihat dari nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak yang berarti menolak model *random effect*. Sehingga kesimpulannya adalah menolak H_0 yang menyatakan model *fixed effect* lebih baik digunakan dalam penelitian ini daripada model *random effect*.

Estimasi Model Regresi Panel

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

No.	Persamaan	R ² Auxiliary Regresion	R ² Regresi Utama (Fixed Effect)
1	R2(EXPD, TK)	0,840619	0,999612
2	R3(TK, EXPD)	0,981334	0,999612

Sumber : data diolah (eviews 8), 2015

Berdasarkan nilai pada heterokedastisitas, bahwa nilai probabilitas semua variabel independen menunjukkan angka dibawah 5 % atau signifikansi pada taraf 5%. Dapat disimpulkan bahwa model regresi terjadi heteroskedastisitas. Untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas, pada penelitian ini menggunakan metode GLS (*Generalized Least – Square*) yang memberikan pembobotan pada variasi data yang digunakan, yaitu dengan kuadrat varians dari model. Sehingga dapat dikatakan dengan menggunakan metode GLS (*Generalized Least – Square*) masalah heteroskedastisitas sudah

Dari pemilihan model yang sudah dilakukan , diperoleh model regresi data panel sebagai berikut :

$$\ln PDRB_{it} = 19,42981 + 0,077735 \ln EXPD_{it} - 0,044504 \ln TK_{it} - 0,053033 \ln DV_{it} + \mu_{it}$$

t statistik (88,20386) (7,933292) (-3,763715) (11,10113)

Hasil uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil uji normalitas nilai statistik uji Jarque-Bera sebesar $-40,53 < \chi^2$ sebesar 1,960 sehingga menolak H_0 , maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal.

Berdasarkan pada tabel 3 menunjukkan nilai $R^2 > R_2, R_3$ maka dapat dikatakan bahwa dalam model penelitian ini tidak terdapat masalah multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas antara variabel independen sebagai berikut :

dapat teratasi (Gujarati, 2011:476). Deteksi autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara uji *Durbin Watson*. Pada output terlihat bahwa nilai DW – stat bernilai 2,289037 yang berada pada kisaran angka 2 ($d_u < DW - stat < 4 - d_u$) yaitu ($1,439 < 2,010 < 2,561$). Hal ini mengindikasikan bahwa pada model tersebut tidak mempunyai masalah autokorelasi. Selanjutnya, sesuai dengan yang dikatan oleh Gujarati di dalam bukunya, bila menggunakan model GLS (*Generalized Least – Square*) dalam penelitian maka hasil output tidak memiliki masalah dalam autokorelasi (Gujarati, 2011: 43).

Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Dari hasil regresi pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pertanian (EXPD), Tenaga Kerja sektor pertanian (TK) dan Kebijakan Kementerian Pertanian dari RENSTRA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (DV) berpengaruh terhadap PDRB di Jawa Tengah tahun 2008 – 2013, diperoleh nilai R^2 dengan pendekatan *fixed effect cross section weight* sebesar 99,96% dapat dijelaskan oleh variasi 3 variabel independen, sedangkan sisanya sebesar 0,04% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Hasil Uji Simultan

Nilai statistik uji F sebesar 1200 $\geq F_{(37;172;5\%)}$ sebesar 1,544 sehingga menolak H_0 , yang berarti variabel independen yaitu Variabel Pengeluaran pemerintah, tenaga kerja sektor pertanian serta variabel dummy secara serentak atau bersama – sama mempengaruhi variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 - 2013.

Hasil Uji t

Variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian memiliki *p – value t – stat* 0,0000. Karena nilai tersebut $< 0,05$ maka variabel ini berada pada daerah tolak H_0 . Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian merupakan variabel yang mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian 35 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Variabel Tenaga Kerja Sektor Pertanian memiliki *p – value t – stat* 0,0002. Karena nilai tersebut $< 0,05$ maka variabel ini berada pada daerah tolak H_0 . Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Tenaga Kerja Sektor Pertanian merupakan variabel yang mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian 35 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Variabel dummy memiliki *p – value t – stat* 0,0000. Karena nilai tersebut kurang dari 0,05 maka variabel ini berada pada daerah tolak H_0 . Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa

variabel dummy merupakan variabel yang mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian 35 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Pembahasan

Pengeluaran pemerintah sektor pertanian memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB sektor pertanian dengan nilai koefisien yaitu 0,077735. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan pengeluaran pemerintah relatif penting berperan dalam sektor perekonomian dan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kebijakan yang berkualitas memiliki anggaran pemerintah yang besar serta dialokasikan secara tepat. Persamaan perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran adalah $Y = C + I + G + (X - M)$ dimana kenaikan pengeluaran pemerintah akan menaikkan pendapatan nasional. Dengan membandingkan nilai G dan Y, serta mengamatinya dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan permintaan agregat atau pendapatan nasional.

Pengaruh tenaga kerja memberikan pengaruh negatif terhadap PDRB sektor pertanian dilihat dari nilai koefisiennya -0,044504. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan tenaga kerja sektor pertanian berpengaruh terhadap PDRB sektor pertanian. Setiap ada kenaikan 1 % tenaga kerja akan mengurangi PDRB sektor pertanian sebesar -0,044504.

Teori produksi kaum Ekonomi Klasik dalam Sukirno (2003 : 192), laju pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor – faktor produksi seperti stok modal, tenaga kerja, sumber daya alam, teknologi dapat menghasilkan output yang banyak. Padahal tidak semua demikian, penggunaan faktor – faktor produksi harus digunakan secara efektif dan efisien.

Penggunaan faktor produksi yang berlebihan akan berakibat pada turunnya output sama dengan faktor produksi tenaga kerja. Keadaan ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh David Richardo dengan teori pertumbuhan hukum hasil yang semakin

berkurang *The Law of Diminishing Return*. PDRB sektor pertanian akan turun karena terlalu banyak dalam penggunaan tenaga kerja. Hal ini dikarenakan sebagian besar yang bekerja di sektor pertanian merupakan penduduk usia lanjut dan pendidikan rendah serta faktor lain seperti rusaknya infrastruktur pertanian, tidak menentukannya kondisi cuaca/iklim, kualitas pupuk serta semakin berkurangnya lahan dan kualitas lahan pertanian yang tersedia. Penurunan luas area tanam berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah penduduk di pedesaan yang sebagian besar bekerja sebagai petani. Sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah menyerap tenaga kerja paling banyak dengan terbatasnya tingkat kualitas SDM, infrastruktur pertanian dan areal lahan pertanian mengakibatkan tenaga kerja sektor pertanian akan menghasilkan produk marginal yang semakin menurun atau lebih dikenal dengan hukum *The Law of Diminishing Return*.

Sesuai dengan hukum *The Law of Diminishing Return* mengatakan “apabila salah satu input tetap, sedangkan input lain ditambah penggunaannya maka tambahan output yang dihasilkan mula – mula naik, akan tetapi seterusnya menurun, apabila input variabel terus ditambahi”.

Kebijakan RENSTRA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2011-2014 ini mempunyai pengaruh terhadap PDRB sektor pertanian yang dapat dilihat dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 – 2013. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan RENSTRA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Program – program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk membangun infrastruktur pertanian berpengaruh terhadap peningkatan sektor pertanian. Infrastruktur yang baik merupakan modal utama bagi peningkatan sektor pertanian, sehingga akan terjadi peningkatan PDRB sektor pertanian.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai penggerak tersedianya modal fisik untuk sektor pertanian nasional. Kebijakan tersebut tidak hanya kebutuhan fisik saja namun

juga terdapat pelatihan, penyuluhan dan kebijakan yang terkait dengan sektor pertanian daerah. Penyediaan prasarana dan sarana pertanian yang meliputi aspek lahan dan air, pembiayaan pupuk dan alat mesin pertanian (alsintan) mempunyai pengaruh terhadap peningkatan PDRB sektor pertanian.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pertanian (EXPD), Tenaga Kerja sektor pertanian (TK) dan RENSTRA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terhadap PDRB sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 – 2013 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

Variabel pengeluaran pemerintah sektor pertanian (EXPD) berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 – 2013. Serta variabel tenaga kerja sektor pertanian (TK) berpengaruh negatif signifikan terhadap PDRB sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 – 2013. Dan kebijakan RENSTRA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada periode 2005 – 2010 dan 2011 – 2014 mempunyai pengaruh terhadap PDRB sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah 2008 – 2013.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas, saran yang dapat diberikan kepada pihak yang bersangkutan adalah sebagai berikut. Pengeluaran pemerintah perlu diperhatikan pengalokasiannya seperti kebijakan pengadaan infrastruktur pertanian. Mulai proses pembangunan sampai perawatannya perlu diperhatikan dengan alokasi dana yang tepat sehingga dapat digunakan dan dimanfaatkan jangka panjang.

Serta pertambahan tenaga kerja yang tidak diiringi dengan pertambahan input lainnya akan menyebabkan output yang dihasilkan sektor pertanian semakin turun. Diperlukan pembangunan pada faktor lain selain tenaga kerja seperti perluasan areal pertanian, pemberian modal bagi petani, pembinaan dan pelatihan kepada petani mengenai berbagai komponen penting dalam sektor pertanian dan teknologi /inovasi baru sehingga akan memberikan nilai

tambah pada output hasil pertanian serta PDRB sektor pertanian.

Dan pembangunan prasarana dan sarana pertanian harus diperbaiki serta di evaluasi untuk infrastruktur jangka panjang, karena masih banyak irigasi yang rusak dan konversi lahan pertanian yang semakin mencemaskan sehingga diperlukan kebijakan RENSTRA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana yang lebih berfokus pada pembangunan pertanian jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta : BPFE.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten. 2012 – 2013. Banten Dalam Angka. Banten.
- Provinsi DIY. 2012 – 2013. DIY Dalam Angka. Yogyakarta.
- Provinsi Jawa Barat. 2012 – 2013. Jawa Barat Dalam Angka. Bandung.
- Provinsi Jawa Tengah. 2009 – 2013. Jawa Tengah Dalam Angka. Semarang.
- Provinsi Jawa Timur. 2012 – 2013. Jawa Timur Dalam Angka. Surabaya.
- Bajwa, A.A., 2014. Sustainable weed management in conservation agriculture. *Crop Protection*, 65, pp.105-113.
- Boediono. 2009. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Collier, P. & Dercon, S., 2014. African Agriculture in 50 Years: Smallholders in a Rapidly Changing World? *World Development*, 63, pp.92-101.
- Daniel, Moehar. 2004. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta :PT Bumi Aksara.
- Darise, Nurlan. 2007. *Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*. Jakarta : PT. Indeks.
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Gujarati, Damodar dan Porter, Dawn. 2011-2012. *Dasar – Dasar Ekonometrika*. Buku 1, Edisi 5. Jakarta : Salemba Empat.
- Halbrendt, J. et al., 2014. Differences in farmer and expert beliefs and the perceived impacts of conservation agriculture. *Global Environmental Change*, 28, pp.50-62.
- Halim, Abdul. 2002. *Seri Akuntansi Sektor Publik – Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- Hariadi, Pramono. 2010. *Dampak Pelaksanaan Otonomi Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Jawa Tengah*. Jurnal Trikonomika, Vol. 9, No. 2, Desember.
- Hasani. Akrom. 2010. *Analisis Struktur Perekonomian Berdasarkan Pendekatan Shift Share di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 – 2008*. Semarang : Skripsi Universitas Diponegoro.
- Irawan dan Suparmoko M. 1982. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gaja Mada.
- Kamaludin, Rustian. 1998. *Pengantar Ekonomi Pembangunan dilengkapi Dengan Analisis Beberapa Aspek Kebijakan Pembangunan Nasional*. Edisi ke 2. Jakarta: FE UI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. <http://www.djpk.depkeu.go.id> (4 Februari 2015).
- Kementerian Pertanian – RENSTRA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. 2011 . <http://www.psp.pertanian.go.id> (22 Agustus 2015).
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta : Erlangga.
- Mangkoesebroto, Guritno. 2010. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta : BPFE.
- Mankiw, N.G. 2006. *Makroekonomi*. Edisi keenam. Terjemahan oleh Fitria liza, dan Imam Nurmawan. Jakarta : Erlangga.

- Mulyadi. 2006. *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Prespektif Pembangunan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rudiger, Dombusch dkk. 2004. *Makroekonomi*. Terjemahan oleh Yusuf Wibisono dan Roy Indra M. Jakarta : Media Global Edukasi.
- Sukirno. Sadono. 2003. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Edisi Ketiga. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sumedi, dkk. 2013. *Dampak Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian dan Pengeluaran Daerah pada Sektor Pertanian Terhadap Kinerja Pertanian Daerah*. Jurnal Agro Ekonomi, Volume 31 No. 2, Oktober 2013, Halaman 97 – 113.
- Todaro, Michele, P. dan Smith, Stephen, C. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Kedelapan. Jilid 1. Jakarta : Erlangga.
- Todaro, Michele, P. dan Smith, Stephen, C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesembilan Terjemahan Haris Munandar, dan Puji A.L. Jakarta: Erlangga.
- Widnyana, I Wayan. 2011. *Pengaruh Luas Lahan Sawah, Jumlah Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Produksi Padi di Kabupaten Badung Tahun 1998 - 2007*. Ganec Swara, Volume 5 No. 1, Februari 2011, Halaman 100 – 104.